

PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT DESA

Rustina, Suharnis, Restu Pauzia, Sjakir Lobud, Ismail

Abstract

The role of women in improving education in rural communities in Indonesia is very important, given the challenges faced by rural areas in terms of access and quality of education. Women are often the main drivers in motivating children, especially women, to continue their education despite limited facilities and social norms that limit their role outside the home. In urban areas, despite better access to education, women still face inequalities in higher education participation and equal employment opportunities. In villages, women's participation in education tends to be lower, with many stalled in primary or secondary education due to a lack of family support, economic burden, or social norms. The success of improving women's education in villages is highly dependent on policies that support equal access to education, such as the provision of scholarships and the improvement of educational infrastructure. Thus, women's education in villages is not only important for individual empowerment, but also for inclusive and sustainable social and economic development in Indonesia. For this reason, holistic interventions are needed that include social change and policies that support recognition of women's role in education.

Keywords: Women's Role, Education, Gender Equality

PENDAHULUAN

Isu-isu yang dianggap paling mendesak oleh masyarakat. Salah satu isu yang mendapat sorotan warga adalah tentang pendidikan yang beragam, setara, dan inklusif, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan partisipasi perempuan. Hal ini terdata bahwa Sepanjang tahun 2023, survei Agenda Warga mencoba merangkum Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terpantau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IDG berada di kisaran 76,26% pada 2021, jauh lebih baik dibandingkan 69,14% satu dekade sebelumnya.

Terlebih, meningkatnya keterlibatan perempuan di parlemen dan makin banyaknya perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional menunjukkan deretan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi dan politik. Hal ini juga menandakan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan berbagai peran pembangunan dalam rangka melakukan perubahan dalam bidang pendidikan.

Perubahan tersebut akan terjadi dalam suatu masyarakat jika di dukung oleh tingkat pendidikan, karena itu di perlukan adanya peran laki-laki dan perempuan dalam melakukan perubahan paradig bermasyarakat, namun dalam masyarakat Indonesia fungsi sosial dan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat diciptakan berbeda. Dalam pengambilan keputusan kebijakan, biasanya suara laki-laki yang diutamakan padahal kebijakan itu harus diterapkan tidak saja pada laki-laki melainkan juga pada kaum perempuan karena anggota masyarakat itu ada laki-laki dan ada perempuan

Di tinjau dari posisi masing-masing maka sesungguhnya peran perempuan dan laki-laki adalah sama. Perempuan juga memiliki harkat dan martabat seperti juga dimiliki kaum laki-laki. Mereka memiliki potensi, meskipun secara kodrat berbeda dari kaum laki-laki, tetapi dapat disejajarkan dalam pertimbangan lainnya. Mereka mempunyai peran masing-masing secara umum namun peran mereka tidak dapat dijalankan karena konstruksi yang terjadi dalam masyarakat yang menganggap bahwa perempuan harus melakukan pekerjaan domestik dan laki-laki harus bekerja diranah publik.

Kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat bahwa keterlibatan perempuan dalam seluruh bidang kehidupan telah berusaha mengonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu ataupun istri, tetapi juga sebagai pekerja dan perempuan karir. Hal tersebut berkaitan dengan konsep gender. Konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural¹ Perbedaan peran yang berkaitan dengan adanya perbedaan peran, fungsi, sifat, kedudukan, tanggung jawab dan hak perilaku baik perempuan maupun laki-laki yang dibentuk dan disosialisasikan oleh norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat demikian pula pada masyarakat desa maupun masyarakat desa.

Gender berarti berhubungan dengan peran dan tugas yang pantas atau tidak pantas baik untuk laki-laki maupun perempuan. Terdapat hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan suatu desa, perspektif gender merupakan suatu strategi global yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingan dan peranan perempuan dan laki-laki tanpa mengesampingkan harkat, kodrat, dan martabat perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Hakekat peningkatan peranan khususnya kaum perempuan adalah meningkatkan pendidikan dan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan ketahanan mental spiritual perempuan.

Kesadaran masyarakat khususnya masyarakat desa mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah pendidikan perempuan dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Masalah ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak.² Mengikutsertakan kaum perempuan dalam segala kegiatan pembangunan diharapkan menambah kekuatan dan kemampuan di dalam melaksanakan pembangunan desa melalui peningkatan pendidikan, sehingga lebih banyak lagi hasil- hasil yang akan dicapai.

¹Mansour, Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta :Insist Press, 2008), 8.

²Nugroho Riant. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 15.

Berdasarkan sumber data World Bank tahun 2007 yang telah diolah kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 51,7% dan 3 tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5% (Rasyid, 2010). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibanding tingkat partisipasi kerja laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan yang dihadapi oleh perempuan seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, keterampilan dan pendidikan yang rendah, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat³ Peran perempuan saat ini menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di negara maju dan berkembang. Kaum perempuan khususnya di daerah pedesaan erat kaitannya dengan ketidakberdayaan dan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kedudukan sosial kaum perempuan yang menuntut perempuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, mengurus anak-anaknya, serta dominasi kaum pria Oleh sebab itu, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program untuk pemberdayaan perempuan.

Gagasan pemberdayaan perempuan semakin menjadi bagian dari perdebatan gender dan pembangunan selama sepuluh tahun terakhir. Pendekatan pemberdayaan untuk perencanaan gender berfokus pada pemberdayaan yang diperkuat oleh perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berguna untuk analisis dan perencanaan antara kepentingan kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam konteks kebijakan sesuai dengan Inpres No 9/2000 tentang pengarusutamaan gender yaitu kebijakan dapat mengintegrasikan pengalaman, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, peraturan serta anggaran

³Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 37

dalam segala bidang (politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, keamanan dan kemasyarakatan). Sesuai hal tersebut berarti pemberdayaan perempuan harus terintegrasi antara pemberdayaan yang dilaksanakan dan kebijakan bagi perempuan.

Indikator keberhasilan pemberdayaan terhadap perempuan yaitu meningkatnya kemampuan kaum perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun pemantauan dan evaluasi kegiatan serta mampu mengelola usaha skala besar atau kecil untuk menunjang kebutuhan hidup. Dalam hal ini perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa ke arah pembangunan. partisipasi mempunyai sifat penting karena masyarakat adalah 5 fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat digunakan untuk mengukur norma individu secara pribadi dan sosial untuk melihat bagaimana pengaruh partisipasi yang dilakukan dengan keberhasilan program.. Masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat.

Salah satu pemberdayaan perempuan di tingkat pedesaan yaitu pelibatan atau ikut sertanya dalam mengabil kebijakan termasuk dalam peningkatan pendidikan masyarakat sebagai salah satu indicator kemajuan suatu desa. maka keberadaan perempuan yang ada di Desa mempunyai peran khusus bukan hanya sekedar ibu rumah tangga yang ada di desa tersebut rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anak. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan perempuan, dan kurangnya kesadaran serta akses yang diberikan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Peran Perempuan dalam meningkatkan pendidikan pada masyarakat Desa.*

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

PEMBAHASAN

Keterlibatan Perempuan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Desa

Pendidikan adalah salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap individu, karena pada dasarnya, pendidikan merupakan proses sosial yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia guna menghadapi tuntutan zaman yang selalu berkembang dan berubah. Zaman yang semakin maju dalam menghadapinya perlu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu ataupun semua masyarakat. Kompetensi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, diperlukan pendidikan yang kualitasnya selalu ditingkatkan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan ini merupakan bagian integral dari tujuan pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pendidikan saat ini, dalam perkembangannya baik di negara maju maupun di negara berkembang, pemahaman terhadap pentingnya pendidikan berada pada posisi yang sangat penting. Terutama dalam mencapai keberhasilan dalam belajar sebagian besar didukung oleh kemauan untuk menempuh pendidikan. Masyarakat yang tidak memiliki keinginan berpendidikan akan sulit mencapai keberhasilan dalam belajarnya.

Peran keluarga merupakan suatu cara yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pendidikan, keluarga adalah salah satu bentuk cara-cara yang akan digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendidikan khususnya perempuan adalah pelibatan keluarga dalam mendukungnya menyikapi situasi dan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik anak yang dihadapi dalam rangka mencapai

tujuan.⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa upaya dalam memotivasi anak khususnya perempuan agar tetap giat belajar keluarga tetap melakukan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan) termasuk penggunaan pendekatan dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

Upaya peningkatan pendidikan harus dilakukan dengan tepat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pemilihan ini harus mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta kebutuhan dan karakteristik setiap individu dalam keluarga, yang tentunya berbeda. Orang tua perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan pendekatan bagi anak perempuan dan laki-laki untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai. Selain memilih pendekatan yang tepat, orang tua juga harus melaksanakannya dengan baik dan membantu anak atau keluarga untuk merubah cara berfikir anak terkait dengan pentingnya pendidikan dalam kehidupan..

Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dalam kemampuan akademik, yang sering disebut sebagai intelektualitas atau kecerdasan. Beberapa peserta didik memiliki tingkat kecerdasan di bawah, rata-rata, atau bahkan di atas rata-rata. Perbedaan ini mempengaruhi kemauan anak untuk melanjutkan pendidikan. Keterbatasan pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran di sekolah yang mencakup kurangnya kesadaran individu terhadap pendidikan, ketidakmampuan anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan menjadi salah satu pemicu kurangnya anak melanjutkan pendidikan. Menghadapi keterbatasan pemahaman ini, orang tua perlu memantau kemajuan belajar anak dan menerapkan pendekatan yang sesuai.

Kondisi Pendidikan Perempuan pada Masyarakat Desa

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender. Namun, dalam pendidikan tinggi bagi kaum perempuan masih mendapatkan penilaian yang tidak baik karena anggapan masyarakat mengenai “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-

⁴ Hamzah B Uno, *Model Pembelajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 3

⁵ Mulyono, , *Strategi Pembelajaran* (Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2011), 8

ujungnyanya di dapur". Kondisi pendidikan kaum perempuan, pada masyarakat umumnya masisi tergolong rendah khususnya pada masyarakat pedesaan apalagi pada tingkat berpendidikan tinggi hal ini sangat di pengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi untuk kaum perempuan.

Kondisi pendidikan kaum perempuan pada masyarakat Desa sekarang sudah mengalami perkembangan khususnya perempuan yang mulai ada yang meneruskan hingga ke pendidikan tinggi meskipun masih didominasi yang hanya sebatas pendidikan SMA, Masyarakat memandang positif kaum perempuan berpendidikan tinggi dan berharap mereka dapat mengaplikasikan ilmu mereka pada masyarakat dan Masih ada masyarakat yang berpersepsi kaum perempuan tidak penting berpendidikan tinggi dengan alasan kodrat mereka di dapur, namun banyak masyarakat yang berpersepsi pendidikan tinggi penting untuk kaum perempuan karena kelak mereka akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya

Pembicaraan tentang pendidikan selalu menjadi hal yang menarik. Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya gencar dalam memperhatikan persoalan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Tuntutan ekonomi yang tidak seimbang dengan mudahnya mendapatkan pendidikan menjadi satu hal yang menarik. Fasilitas mencakup sarana dan prasarana pendidikan berkembang dengan pesat. Tapi, disayangkan masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan bukanlah hal penting. Apalagi jika dikaitkan dengan perempuan, masih banyak masyarakat yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Apalagi sampai jenjang perguruan tinggi. Fenomena ini begitu sering terdengar di masyarakat desa. Keengganan untuk bersekolah lanjut atau ke perguruan tinggi menjadi suatu tanda tanya yang tidak pernah terjawab sampai saat ini. Hingar-bingarnya kehidupan kampus di sekitar mereka ternyata tidak berdampak pada pola pikir mereka tentang pendidikan.

Berdasarkan analisa tersebut diharapkan dengan tulisan ini dapat mengumpulkan data tentang konsep-konsep pendidikan bagi anak perempuan pada masyarakat desa. Dugaan awal bahwa tulisan ini adalah, masyarakat desa yang

kecenderungan ingin cepat bekerja, tapi 'malas sekolah' menjadi menarik untuk di kaji, apalagi tempat tinggal mereka yang berdekatan dengan dunia kampus, mengapa pola pikir mereka tetap tidak berubah.

Data yang dapat dilihat bahwa Pendidikan perempuan di Indonesia saat ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dilihat menurut daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2022, jenis ijazah tertinggi yang dimiliki sebagian besar perempuan di pedesaan adalah lulusan SD (31,28%), sementara perempuan di perkotaan sebagian besar adalah lulusan SMA/SMK (33,36%).⁶

Persentase perempuan yang lulus dari perguruan tinggi di perkotaan adalah sebesar 13,97%, lebih dari dua kali lipat dibanding di pedesaan yang hanya berkisar 6,00%. Tak hanya itu, perempuan yang tidak memiliki ijazah atau tidak pernah bersekolah formal di pedesaan ada sebanyak 19,77%, jauh lebih banyak dibanding perkotaan yang sebanyak 10,26%. Ditambah lagi, ada sebanyak 7,35% perempuan usia 15 tahun ke atas di pedesaan yang buta huruf, sedangkan di perkotaan hanya sepertiganya, yaitu 2,83%.

Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah untuk perempuan adalah 8,17 tahun, sementara laki-laki adalah 8,92 tahun. Perbedaan sebesar 0,75 ini tergolong signifikan karena perkembangan periode lama sekolah setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,10 tahun saja. Kesenjangan ini kemudian berdampak pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan jika dibandingkan laki-laki.⁷

Upah rata-rata per jam untuk perempuan adalah sejumlah Rp 17.848,00, masih lebih rendah dari laki-laki yang sejumlah Rp 18.210,00. Dalam pasar tenaga kerja formal, perempuan hanya memiliki kontribusi 35,57%, karena mereka cenderung lebih banyak bekerja di sektor informal dengan persentasenya mencapai 63,80%. Ketimpangan pendidikan yang lebih signifikan akan semakin terlihat nyata

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2022 (Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2022)* 1

⁷ Ibid

di wilayah pedesaan. Banyaknya anggapan yang mendiskreditkan pentingnya pendidikan bagi perempuan menjadi faktor utama sulitnya perempuan di pedesaan mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Keterlibatan perempuan di Desa sebenarnya yang terlihat terlihat bukan hanya dari keterlibatan fisik semata, perempuan digerakkan untuk aktif menyampaikan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Partisipasi dalam penelitian ini akan ditinjau secara lebih mendalam dari keterlibatan atau aktivitas perempuan secara aktif mengenai keikutsertaan perempuan dalam proses pemberdayaan melalui program kegiatan desa bagi Perempuan yang ada di Desa. Sehingga Partisipasi menjadi hal penting dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”,⁸ dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemahaman tentang terkait konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri.

Paradigma pemberdayaan masyarakat mengemuka sebagai isu sentral yang muncul sebagai tanggapan atas adanya kesenjangan yang belum terpecahkan terutama masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat

⁸Alfitri. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011)

pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah⁹.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan agar tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki

Penyebab Pendidikan Perempuan di Pedesaan Masih Tertinggal

Ada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi rendahnya pendidikan perempuan di pedesaan. Faktor eksternalnya adalah sangat kurangnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung yang dapat memberikan akses dan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat pedesaan untuk mengenyam pendidikan. Sementara faktor internalnya, menurut hasil penelitian terkait, adalah karena masih banyak masyarakat di desa yang memiliki persepsi bahwa pendidikan tinggi untuk perempuan adalah pemborosan.

Biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan dianggap percuma karena pada akhirnya perempuan belum tentu bekerja dan hanya akan mengurus rumah tangga. Berbeda dengan laki-laki yang didorong untuk menempuh pendidikan sebagai bekal untuk bekerja menafkahi keluarga. Masyarakat pedesaan juga masih beranggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi rentan menjadi perawan tua karena waktunya akan tersita untuk bersekolah dan membuat mereka cenderung menunda pernikahan. Fakta menunjukkan proporsi perempuan

⁹Ibid. 21

yang menikah sebelum usia 18 tahun di pedesaan (13,73%) mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding perempuan di perkotaan (6,12%).¹⁰

Selain itu, masyarakat pedesaan masih beranggapan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi rentan memiliki keluarga yang tidak harmonis sebab mereka akan disibukkan dengan pekerjaannya dan tidak dapat mengurus anak serta rumah tangga sebagaimana mestinya.

Masyarakat di desa masih memiliki pola pikir bahwa mengurus anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab seorang istri saja. Pola pikir masyarakat pedesaan inilah yang harus menjadi perhatian dan bersama-sama diarahkan agar lebih terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka sendiri. Umumnya, mereka masih belum menyadari bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan dampak dan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan dan generasi anak cucu mereka.

Padahal, perempuan memegang peran penting jika pada akhirnya mereka memilih untuk melahirkan generasi penerus. bahkan semakin tinggi pendidikan orang tua, khususnya ibu, semakin baik pula pola asuh yang diterapkan, maka kecenderungan pelibatan perempuan dalam menentukan pendidikan juga semakin tinggi.

Upaya yang dapat dilakukan

Pembangunan infrastruktur bisa menjadi upaya utama yang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pedesaan. Tidak hanya untuk peningkatan pendidikan saja, infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada berbagai unsur secara keseluruhan.

Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pihak baik masyarakat umum maupun lembaga swasta. Dalam persoalan pendidikan, beasiswa masih menjadi solusi yang paling konkret. Namun, dalam hal

¹⁰ Irwansyah Putra , *Perempuan petani memanen timun suri di Desa Cot Cut, Aceh Besar, Aceh.* (Antara FotoDiterbitkan: April 7, 2023 11.07am WIB Diperbarui: Januari 29, 2024) 10.04am WIB

pendidikan perempuan, tentunya diperlukan beasiswa yang lebih eksklusif untuk perempuan di wilayah pedesaan.

Adanya program beasiswa yang eksklusif ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perempuan di pedesaan dalam memperoleh pendidikan. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) untuk perempuan adalah 73,55 tahun, lebih tinggi daripada laki-laki yang berkisar di 69,67 tahun. Angka harapan lama sekolah perempuan adalah 13,22 tahun, lebih unggul dari laki-laki yang 12,95 tahun.¹¹

Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang untuk hidup dan sekolah lebih panjang daripada laki-laki. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas perempuan sebagai modal untuk pembangunan nasional merupakan sebuah investasi jangka panjang yang strategis dan visioner.

Selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan nonformal di pedesaan untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat pedesaan tentang pentingnya mendapatkan pendidikan tinggi dan dampak yang akan mereka peroleh dari pendidikan itu sendiri. Ini dapat dilakukan melalui program relawan atau pengabdian masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Usaha-usaha ini lebih dari sekadar untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender. Lebih jauh lagi, ini adalah upaya bersama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar, berdaya dan sejahtera melalui kelembutan, kecakapan, dan ketangguhan kaum perempuan.

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam

¹¹ Ibid

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.¹² Disamping itu pengarus utamaan gender juga merupakan salah satu dari empat *key cross cutting issues* dalam Propenas. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, propinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan.

Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak.

Konsep tentang pemberdayaan perempuan telah menjadi suatu fenomena sosial di masyarakat dewasa ini yang banyak didiskusikan, diteliti, dan menjadi wacana publik yang relatif hangat. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki atau sering kali di kenal dengan konsep gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secaraimbang dalam masyarakat.¹³ Konsep ini sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Secara etimologis kata „gender“ berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Kata „gender“ bisa diartikan

¹² BPS, United Nations Development Fund for Women. Gender Statistics and Indicators (2000) 11.

¹³Astuti, Tri Marhaeni Pudji.2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. (Semarang. Unnes Pres 2011).1

sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku yang dapat disebut sebagai harapanharapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁴

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidak adilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Faqih dalam Achmad M. menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem. Selanjutnya Achmad M. menyatakan, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus

¹⁴Demartoto, Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga* Difabel, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007), 8.

perlakuan diskriminatif. Maka manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.¹⁵

Bedasarkan pandangan di atas maka berupa kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk beban kerja lebih banyak jika di bandingkan dengan kaum laki-laki. Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh.

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu Tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki); Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; Penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang kholistik; Kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekwen; Rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender.

¹⁵Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001). 33

Kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan

Kondisi ini telah banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk menunjukan bahwa peran perempuan, yang menunjukkan aktivitas kaum perempuan dalam kegiatan publik khususnya dalam mengatasi kesulitan dalam bidang ekonomi keluarga cukup tinggi jika dilihat dari proses kegiatan sehari-hari baik sebagai petani, buruh maupun sbagai pegawai, namun masyarakat masih tetap melihat bahwa perempuan bagian terpenting adalah urusan rumah tangga merupakan kewajiban mutlak di perankan oleh perempuan namun tetap memperhatikan pendidikan baik formal maupun non formal.

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat desa, Pendidikan yang inklusif dan kesetaraan gender merupakan isu yang saling terkait dan menjadi kunci dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Meskipun telah terjadi kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran semua pemangku kepentingan terutama peran perempuan dalam meningkatkan pendidikan perempuan di desa dan mendorong partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan. Sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan gender yang masih dominan dalam banyak komunitas pedesaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di pedesaan dan solusinya adalah melibatkan perempuan yang tidak hanya pendidikan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, karena perempuan yang lebih

terdidik cenderung lebih mampu mengelola sumber daya keluarga dengan lebih baik, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang. Unnes Press, .2011
- Alfitri. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2022 (Survei Sosial Ekonomi Nasiona (SUSENAS) BPS 2022*
- B. Uno, Hamzah B Uno, *Model Pembelajaran* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- BPS, United Nations Developmen Fund for Women. *Gender Statistics and Indicators*, 2000
- Demartoto, Argyo. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga* Difabel. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta :Insist Press. 2008.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Mulyono, *Strategi Pembelajaran*, Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2011
- Muthali'in, Achmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001
- Nugroho,Riant. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Putra, Irwansyah, *Perempuan petani memanen timun suri di Desa Cot Cut, Aceh Besar, Aceh*. Antara FotoDiterbitkan: April 7, 2023 11.07am WIB Diperbarui: Januari 29, 2024, 10.04am WIB
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan PTO PNPM-MP*, Jakarta, 2009